

PELAYANAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM PENGENDALIAN ANGKA KELAHIRAN DI KOTA KUPANG

Anjely Rafael¹, Ermelia Sadrak², Iin Mirawari Samah³, Fransiskus Maurice Riberu⁴

¹²³⁴ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2026

Revised Januari, 2026

Accepted Januari, 2026

Available Januari, 2026

rafaelanjela613@gmail.com,

ermeliasadrak@email.com,

iinsamah3@gmail.com,

fransriberu563@gmail.com

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu
Bangsa Institute

ABSTRAK

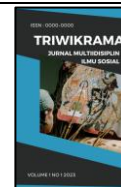
Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kota Kupang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan daerah, terutama akibat angka kelahiran yang belum terkendali secara optimal. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam pengendalian kelahiran dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan Program Keluarga Berencana oleh BKKBN Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive dan meliputi pejabat bidang KB, penyuluh KB, kader KB, serta masyarakat atau akseptor KB. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan Program KB di Kota Kupang telah dilaksanakan melalui penyediaan alat kontrasepsi, penyuluhan, pelayanan keliling, dan pendekatan berbasis komunitas. Dukungan tokoh masyarakat dan kerja sama lintas sektor menjadi faktor pendukung utama, sementara keterbatasan penyuluh, minimnya anggaran, rendahnya konsistensi penggunaan kontrasepsi, dan pengaruh nilai budaya masih menjadi kendala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pelayanan KB memerlukan pendekatan teknis, sosial, dan kultural secara terpadu agar pengendalian angka kelahiran di Kota Kupang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Keluarga Berencana, pelayanan publik, pengendalian kelahiran, BKKBN, Kota Kupang.

ABSTRACT

Rapid population growth remains a major development challenge in Kupang City, particularly due to birth rates that are not yet optimally controlled. The Family Planning (FP) Program is a strategic government instrument for regulating fertility and improving family welfare. This study aims to analyze the implementation of Family Planning services by BKKBN Kupang City and to identify factors influencing their effectiveness. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. Informants were purposively selected and included FP officials, counselors, cadres, and program beneficiaries. Data were analyzed using the Miles and Huberman model. The findings indicate that Family Planning services in Kupang City have been implemented through the provision of contraceptives, counseling, mobile services, and community-based approaches. Support from community leaders and cross-sectoral collaboration serves as key enabling factors, while limited human resources, budget constraints, inconsistent contraceptive use, and cultural beliefs remain significant barriers. The study concludes that strengthening Family Planning services requires an integrated technical, social, and cultural approach to ensure more effective and sustainable fertility control in Kupang City.

Keywords: Family Planning, public services, fertility control, BKKBN, Kupang City.



1. PENDAHULUAN

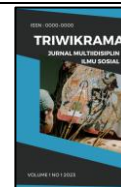
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah yang tergolong dalam kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia, dengan karakteristik geografis kepulauan serta keterbatasan infrastruktur dan pelayanan publik. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi NTT mencapai 5,33 juta jiwa, meningkat sekitar 0,64 juta jiwa dibandingkan tahun 2010. Peningkatan tersebut mencerminkan laju pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 2,06 persen, yang menunjukkan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Kondisi ini mengindikasikan melemahnya efektivitas program pengendalian pertumbuhan penduduk yang telah dijalankan oleh pemerintah.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya pertumbuhan penduduk di NTT adalah peningkatan angka kelahiran. Data menunjukkan bahwa tingkat fertilitas di beberapa wilayah perkotaan, khususnya Kota Kupang sebagai pusat pertumbuhan penduduk terbesar di NTT, masih berada di atas rata-rata nasional. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT, Total Fertility Rate (TFR) Kota Kupang pada tahun 2020 mencapai 3,57, yang berarti rata-rata setiap perempuan usia subur melahirkan tiga hingga empat anak. Angka ini masih jauh di atas target TFR nasional sebesar 2,1, yang mencerminkan tingkat fertilitas pengganti (replacement level fertility).

Tingginya angka kelahiran tersebut menjadi persoalan serius karena tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan lapangan kerja, serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Akibatnya, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali berpotensi memicu berbagai permasalahan sosial, antara lain meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial, kriminalitas, serta rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan kependudukan tidak hanya bersifat demografis, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas.

Pemerintah Indonesia telah merespons permasalahan tersebut melalui kebijakan pengendalian penduduk dengan membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Program Keluarga Berencana (KB) menjadi instrumen utama dalam upaya menurunkan angka kelahiran dan mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), yang menekankan konsep “dua anak cukup”. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat mengendalikan struktur penduduk, menurunkan tingkat ketergantungan, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Namun demikian, implementasi program KB di Kota Kupang masih menghadapi berbagai kendala. Faktor sosial-budaya masih menjadi tantangan utama, di mana sebagian masyarakat masih memegang nilai tradisional seperti anggapan “banyak anak banyak rezeki” serta keyakinan bahwa keluarga dianggap belum lengkap tanpa memiliki anak laki-laki dan perempuan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah Penyuluh atau Pembina Keluarga Berencana (PKB) yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah sasaran, rendahnya dukungan anggaran, serta masih rendahnya konsistensi penggunaan alat kontrasepsi turut memengaruhi efektivitas program. Situasi ini diperparah oleh dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan, serta keterbatasan kemampuan peserta dalam memanfaatkan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi.



2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai pelaksanaan pelayanan Program Keluarga Berencana (KB) oleh instansi yang berwenang di Kota Kupang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara rinci proses pelayanan, dinamika pelaksanaan program, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan KB dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Penelitian dilaksanakan pada Dinas yang menangani pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Kupang, khususnya pada bidang yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pelayanan dan penyuluhan program KB.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, dengan kriteria individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program KB. Informan tersebut meliputi Kepala Bidang Keluarga Berencana, penyuluh KB, kader KB, serta masyarakat atau akseptor KB yang menjadi sasaran program. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis untuk menggali informasi terkait proses sosialisasi, mekanisme pelayanan, kerja sama lintas sektor, kendala yang dihadapi, serta evaluasi pelaksanaan program KB di Kota Kupang.

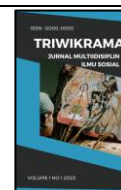
Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi langsung untuk mengamati proses pelayanan KB, aktivitas penyuluhan, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi di lapangan. Observasi dilakukan guna memperoleh gambaran faktual mengenai praktik pelayanan dan interaksi antara petugas KB dengan masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dengan menelaah dokumen resmi instansi terkait, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel dan jurnal ilmiah yang relevan dengan program Keluarga Berencana dan teori pelayanan publik.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis dan terstruktur sehingga memudahkan penarikan makna. Kesimpulan penelitian ditarik berdasarkan keterkaitan antar-temuan serta dikaitkan dengan kerangka teori yang digunakan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, serta pengecekan ulang informasi kepada informan apabila diperlukan untuk memastikan konsistensi dan validitas data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelayanan Program Keluarga Berencana oleh BKKBN Kota Kupang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Kupang dilaksanakan melalui pendekatan yang relatif komprehensif dan tidak terbatas pada penyediaan alat kontrasepsi semata. BKKBN Kota Kupang mengembangkan pelayanan KB sebagai suatu proses sosial yang mencakup aspek edukatif, preventif, dan pemberdayaan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan kependudukan yang menempatkan keluarga sebagai unit dasar pembangunan dan subjek utama dalam pengambilan keputusan reproduksi.



Bentuk pelayanan yang paling menonjol adalah penyediaan layanan KB melalui fasilitas kesehatan formal seperti puskesmas dan klinik KB, serta melalui pelayanan keliling yang menjangkau wilayah-wilayah dengan akses layanan kesehatan terbatas. Pelayanan keliling menjadi strategi penting mengingat kondisi geografis Kota Kupang yang memiliki sebaran penduduk tidak merata dan keterbatasan mobilitas sebagian masyarakat. Keberadaan layanan ini memperlihatkan upaya institusi untuk menurunkan hambatan struktural dalam mengakses pelayanan KB, baik hambatan jarak, biaya, maupun informasi.

Selain layanan medis, BKKBN Kota Kupang secara konsisten melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi KB melalui berbagai forum sosial, seperti Posyandu, pertemuan kelurahan, kegiatan PKK, dan kunjungan rumah. Strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang dialog antara penyuluh KB dan masyarakat. Melalui pendekatan tatap muka, penyuluh dapat menjelaskan manfaat KB, meluruskan kesalahpahaman terkait efek samping kontrasepsi, serta membangun kesadaran bahwa KB berkaitan erat dengan kesehatan ibu dan anak, stabilitas ekonomi keluarga, dan kesejahteraan jangka panjang.

Pelayanan KB juga didukung oleh ketersediaan berbagai metode kontrasepsi, mulai dari metode jangka pendek seperti pil, suntik, dan kondom hingga metode jangka panjang seperti IUD dan implan. BKKBN bekerja sama dengan puskesmas dalam melakukan pendataan dan pengelolaan stok alat kontrasepsi secara berkala guna memastikan kontinuitas layanan. Ketersediaan pilihan metode ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan, kebutuhan reproduksi, dan preferensi personal, sehingga meningkatkan peluang keberlanjutan penggunaan kontrasepsi.

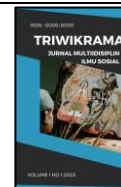
Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi aktor kunci dalam pelaksanaan pelayanan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyampai kebijakan, tetapi juga sebagai konselor, mediator, dan pendamping keluarga. Pendekatan personal yang dilakukan oleh penyuluh terbukti mampu membangun kepercayaan masyarakat, terutama bagi keluarga yang masih ragu terhadap penggunaan kontrasepsi modern. Keberadaan penyuluh di tengah masyarakat memperkuat dimensi humanis pelayanan publik, di mana pelayanan KB tidak dipersepsikan sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai kebutuhan keluarga.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan pelayanan, terutama terkait rasio jumlah penyuluh KB yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk sasaran. Kondisi ini berimplikasi pada intensitas pendampingan yang belum merata. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang enggan mengikuti program KB karena pengaruh mitos, ketakutan terhadap efek samping kontrasepsi, serta kuatnya nilai budaya tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan KB tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam mengelola faktor sosial dan kultural.

Secara keseluruhan, pelayanan Program KB di Kota Kupang dapat dipahami sebagai kombinasi antara pelayanan medis, edukasi sosial, dan pendekatan partisipatif. Pelayanan yang dilakukan telah bergerak melampaui fungsi administratif menuju upaya perubahan perilaku dan kesadaran reproduksi masyarakat, meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi sumber daya dan strategi komunikasi yang lebih adaptif.

Peran Sosial, Budaya, dan Komunitas dalam Mendukung Pelayanan KB

Hasil penelitian menegaskan bahwa faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerimaan dan keberhasilan Program KB di Kota Kupang. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat



menjadi modal sosial penting dalam mendukung pelaksanaan pelayanan KB. Modal sosial ini tercermin dalam keterlibatan masyarakat secara kolektif dalam kegiatan sosialisasi dan pelayanan keliling, mulai dari membantu mengorganisasi peserta hingga mendampingi keluarga yang membutuhkan konseling.

Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat kelurahan memainkan peran strategis sebagai agen legitimasi sosial program KB. Informasi yang disampaikan oleh figur-figur yang dihormati cenderung lebih mudah diterima dibandingkan pesan yang disampaikan secara formal oleh birokrasi. Melalui forum-forum sosial seperti musyawarah kelurahan, pertemuan RT/RW, dan kegiatan keagamaan, pesan KB dapat dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai lokal, sehingga mengurangi resistensi masyarakat.

Kegiatan komunitas seperti Posyandu, PKK, dan kelompok ibu-ibu menjadi ruang sosial yang efektif untuk membahas isu kesehatan reproduksi secara lebih terbuka dan informal. Dalam konteks ini, penyuluh KB tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun dialog dua arah yang memungkinkan masyarakat berbagi pengalaman dan kekhawatiran. Selain itu, pemanfaatan media sosial lokal dan grup WhatsApp RT/RW menjadi inovasi komunikasi yang relevan dengan perkembangan teknologi, meskipun masih menghadapi tantangan literasi digital di sebagian kelompok masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang KB Dinas BKKBN Kota Kupang menunjukkan bahwa strategi sosialisasi dilakukan secara berlapis, baik melalui pendekatan langsung maupun media massa seperti radio lokal. Dukungan lintas sektor, termasuk puskesmas, sekolah, PKK, dan sektor swasta, memperluas jangkauan pelayanan KB dan memperkuat koordinasi pelaksanaan program. Namun demikian, nilai budaya tertentu, seperti pandangan “banyak anak banyak rezeki” dan keinginan memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu, masih menjadi hambatan kultural yang memengaruhi keputusan reproduksi sebagian keluarga.

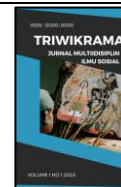
Kendala lain yang teridentifikasi meliputi keterbatasan jumlah penyuluh KB, minimnya anggaran sosialisasi, serta rendahnya konsistensi penggunaan kontrasepsi oleh sebagian akseptor. Untuk mengatasi hal tersebut, BKKBN melakukan monitoring dan evaluasi rutin, meningkatkan intensitas penyuluhan, serta memperkuat kerja sama lintas sektor. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan KB sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan formal dan dinamika sosial di tingkat komunitas.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan Program KB di Kota Kupang telah berjalan relatif baik dan memperoleh dukungan sosial yang cukup luas. Namun, keberlanjutan dan efektivitas program masih memerlukan penguatan dalam aspek edukasi berkelanjutan, perluasan jangkauan pelayanan, dan peningkatan konsistensi penggunaan kontrasepsi. Dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat dan memperkuat pendekatan budaya yang sensitif terhadap nilai lokal, Program KB di Kota Kupang berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan keluarga kecil, sehat, dan sejahtera secara berkelanjutan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Kupang telah dilaksanakan secara cukup komprehensif melalui kombinasi pelayanan medis, penyuluhan, dan pendekatan sosial berbasis komunitas. BKKBN Kota Kupang tidak hanya berfokus pada penyediaan alat kontrasepsi, tetapi juga pada



upaya edukasi dan pendampingan keluarga guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi. Pelibatan penyuluh KB, kader, tokoh masyarakat, dan tokoh agama terbukti berperan penting dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program KB.

Namun demikian, efektivitas pelayanan KB masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah penyuluh KB, minimnya anggaran sosialisasi, rendahnya konsistensi penggunaan alat kontrasepsi oleh sebagian akseptor, serta masih kuatnya pengaruh nilai budaya tertentu yang kurang mendukung pengendalian kelahiran. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program KB tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pelayanan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kelembagaan. Oleh karena itu, pelayanan KB di Kota Kupang memerlukan penguatan berkelanjutan agar mampu berkontribusi secara optimal dalam pengendalian angka kelahiran dan peningkatan kualitas keluarga.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar BKKBN Kota Kupang meningkatkan jumlah dan kapasitas penyuluh KB melalui pelatihan berkelanjutan serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat dukungan anggaran guna mendukung kegiatan sosialisasi dan pelayanan KB secara berkesinambungan. Selain itu, pendekatan budaya dan partisipatif perlu terus dikembangkan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal untuk mengatasi resistensi budaya terhadap program KB. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji secara kuantitatif tingkat efektivitas pelayanan KB serta hubungan antara faktor sosial-budaya dan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi guna memperkaya kajian kebijakan kependudukan di tingkat daerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

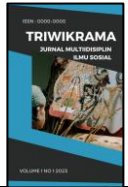
- Agustina, N. L. (2019). *No Title*. ペインクリニック学会治療指針, 2, 1-9.
- Jessica, T., Nino, T., Kosat, E., & Studi, P. I. P. (2024). Penguatan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap layanan keluarga berencana. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 295-303. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i2.2936>
- Mursawal, A. (2015). *Makrozoobenthos di kawasan terlindung dan tidak terlindung perairan Krueng Reuleung Leupung Kabupaten Aceh Besar*. Banda Aceh: Fakultas Kelautan dan Perikanan.
- Munandar, A., & Susilowati, P. (2003). *Keong dari Taman Nasional Gunung Halimun*. Cibinong: JICA Biodiversity Conservation Project.
- NPP, Y. D. N. (2023). Efektivitas pelayanan program keluarga berencana oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan angka kelahiran di Kota Kupang. *Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, 4(3), 1-12.
- Oemarjati, B. S., & Wardana, W. (1990). *Taksonomi avertebrata*. Jakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia.
- Sarong, M. A., & Andi, M. (2016). Komposisi bentuk cangkang Neritidae di perairan payau Sungai Reuleung Leupung Kabupaten Aceh Besar. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Biotik 2016*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Sarong, M. A., Boer, R., Dahuri, Y., Wardiatno, & Kamal. (2010). Pengambilan kerang mangrove *Geloina* yang ramah lingkungan dalam masyarakat Leupung Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Moluska Indonesia*, 1, 59-64.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 11, Number 10, 2026

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Sudarajat, D. (2024). *Pemasaran 5.0: Menciptakan koneksi di era digital* (T. Yuwanda, Ed.). Jakarta: Penerbit Takaza Innovatix Labs.

*Corresponding author

E-mail addresses: rafaelanjela613@gmail.com